

**IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1999 TERHADAP
EKSPLOITASI SUMBER DAYA HAYATI LAUT
(Studi Di Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep)**

PENULISAN HUKUM

OLEH

MAKSYAR EFENDI

201610110312293



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM**

2017

PENULISAN HUKUM

IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1999 TERHADAP
EKPLOITASI SUMBER DAYA HAYATI LAUT

(Studi Di Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep)

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum

Oleh

MAKSYAR EFENDI

201610110312293



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2017

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia, nikmat dan rahmatnya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum ini (skripsi), sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada rasulullah muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Yang tertuang dalam penulisan skripsi ini lebih banyak diangkat dan dibahas dari hasil pengalaman pribadi dan hasil keterlibatan penulis langsung dalam kegiatan penanggulangan upaya responsif terhadap penyelamatan sumber daya hayati laut yang dieksploitasi.

Pada kesempatan ini, penulis mempersembahkan rasa terima kasih yang besar kepada :

1. Kedua orang tua yang telah membesarkan saya;
2. Rektor Universitas Muhamadiyah Malang;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta para Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Kepada Bapak Dr. Surya Anoraga, SH., M.H. Sebagai Pembimbing I, yang disela-sela kesibukan beliau sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Malang masih dapat meluangkan waktunya memberikan bantuan, arahan serta bimbingan kepada penulis;
5. Kepada Bapak Dr. Tongat, SH., MH. Sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan mulai dari awal penulisan skripsi kepada penulis;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis haturkan terima kasih. Semoga Allah SWT membalas segala budi baik yang telah diberikan kepada Penulis. Harapan Penulis, kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya.

Amin yarabbal ‘alamin...

Malang, 29 Juli 2017

Penulis

Maksyar efendi



DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR COVER/SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN PENULISAN HUKUM	iii
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Karakteristik Wilayah Pesisir	14
a) Pengertian Pencemaran dan Pengrusakan	14
b) Pengertian Wilayah Pesisir.....	16
c) Potensi Sumber daya Alam Pesisir.....	17
B. Kawasan Konservasi	18
a) Definisi Kawasan Konservasi	18
b) Kawasan Konservasi	23
C. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat	25
D. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sumber Daya Alam.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kepulauan Sapeken	29
B. Penerapan Pasal 19 PP Nomor 19 Tahun 1999.....	31
C. Hambatan-Hambatan.....	44
D. Upaya Penanggulangan	47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran-saran	53

DAFTAR PUSTAKA

INDEX

LAMPIRAN



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah marlang, 2015, *HukumKonservasiSumberDayaAlamHayati Dan Ekosistemnya*, Jakarta.
- Anggoro,2010.*ModulMatrikulasiPengelolaanPesisirdanLaut*, UniversitasDiponegoro, Semarang.
- Anggoro,2012.*PemanfaatanSumberDayaPesisirdanLautanBerwawasanLingkungan*, UniversitasDiponegoro, Semarang.
- Burhanashshofa, 2013,*MetodePenelitianHukum*, Jakarta, RinekaCipta.
- Clark, J.R. 2010.*Coastal Zone Management Handbook*. Lewis Publisher
- Dahuri,2009.*PendayagunaanSumberdayaKelautanuntukKesejahteraan Rakyat*, PT PradnyaParamitha, Jakarta.
- Dahuri, R.,J. Rais, S.P. Ginting, dan M.J. Sitepu. 2013. *PengelolaanSumberdaya Wilayah Pesisir dan LautansecaraTerpadu*. PT PradnyaParamitha, Jakarta
- Gultom.2011. *Partisipasi Rakyat dalam Pembangunan*.UKSW.Salatiga.
- Hardjasoemantri.2012. *AspekHukumPartisipasiMasyarakatdalamPengelolaan dan Pemberdayaan LingkunganHidup*.Universitas Gajah Mada Press. Yogyakarta.
- Kusnadi. 2011. *KonflikSosialNelayan. KemiskinandanPerebutanSumberdayaAlam*.Penerbit LKIS. Yogyakarta.
- M. ghufraan2015, *PengelolaanPerikanan Indonesia*, Yokyakarta, Pusatakabaru press.
- PedomanPenulisanHukum,2012, FH UMM, Malang.
- Robins, S. 2011. *PerilakuOrganisasi*. PT. Prenhalindi, Jakarta.
- SatjiptoRahardjo,2006,*IlmuHukum*, Bandung.
- Supriharyono, 2010.*PelestariandanPengelolaanSumberdayaAlam di Wilayah PesisirTropis*.Penerbit PT. GramediaPustakaUtama, Jakarta.
- Utrecht, 1966, *PengantarDalamHukum Indonesia*, Jakarta.
- DepartemenKelautandanPerikanan.2002. *Pedoman Tata RuangPesisirdanLaut*.

Departemen Kelautan dan Perikanan. 2003.
Pedoman Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah.
Direktorat Konservasi dan Taman Laut Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil, 2003. Jakarta

Jimly Asshiddiqie, Makalah Penegakan Hukum, diakses dari google.com pada 20
Oktober 2016 <http://ashibly.blogspot.com/2011/07/teori-hukum.html>

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 tahun 2014, tanggal 4
September 2014. Jakarta.

LISPI, Jakarta. 2009. *Keanekaragaman Hayati Laut Aset Pembangunan
Berkelanjutan Indonesia.* Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2007, *tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.*

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999
Tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Laut.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990
Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3419).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985
Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, *tentang Penataan Ruang.*

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, *tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan
Pulau-Pulau Kecil.*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan.

Undang-Undang RI No. 5 Tahun
1990. "Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya".

[http://sastrakelabu.wordpress.com/2009/12/14/proses-penegakan-hukum-
lingkungan-berdasarkan-uu-nomor-23-tahun-1997-tentang-pengelolaan-
lingkungan-hidup/](http://sastrakelabu.wordpress.com/2009/12/14/proses-penegakan-hukum-lingkungan-berdasarkan-uu-nomor-23-tahun-1997-tentang-pengelolaan-lingkungan-hidup/)

[http://id.shvoong.com/law-and-politics/enviromental-law/2114594-proses-
penegakan-hukum-lingkungan/#ixzz1MaAM1G00](http://id.shvoong.com/law-and-politics/enviromental-law/2114594-proses-penegakan-hukum-lingkungan/#ixzz1MaAM1G00)